



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAN SETIADI

Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 August 2026

Pihak Pertama
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI



YAN SETIADI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI



TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	05 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	01 - Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	16.93 Indeks
		02 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	86.39 Nilai
		03 - Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.5 Nilai
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5 Nilai
		05 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.52 Indeks
2.	06 - Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.74 Indeks
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	98.56 Persen
		03 - Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen
3.	07 - Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	2.74 Nilai
		02 - Nilai telaah seawat intern Inspektorat Utama	85.28 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 13,218,336,000 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	12,031,496,000
2.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	1,186,840,000

Jakarta, 06 August 2026

Pihak Pertama
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



YAN SETIADI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

A. MATRIKS REVIU SASARAN/INDIKATOR/TARGET INDIKATOR
A.1 MATRIKS REVIU SASARAN/INDIKATOR INSPEKTORAT UTAMA

Semula				Menjadi				Justifikasi
ID	Sasaran Program	ID	Indikator Kinerja	ID	Sasaran Program	ID	Indikator Kinerja	
SP 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	1.1	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	SP 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	1.1	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Tetap
		1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama			1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	Tetap
		1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama			1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Terdapat penyesuaian manual IKU
		1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama			1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Tetap
		1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama			1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Tetap
SP2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	SP2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Tetap
		2.2	Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti			2.2	Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	Tetap
		2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu			2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Tetap

Semula				Menjadi				Justifikasi
ID	Sasaran Program	ID	Indikator Kinerja	ID	Sasaran Program	ID	Indikator Kinerja	
		2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu			2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Tetap
SP3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	SP3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Tetap
		3.2	Nilai telaah seawat intern Inspektorat Utama			3.2	Nilai telaah seawat intern Inspektorat Utama	Tetap

Terdapat penyesuaian Manual IKU “Nilai AKIP Inspektorat Utama” sebagaimana berikut:

Keterangan	Semula	Menjadi	Justifikasi
Sasaran Program	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Tetap
Indikator Kinerja	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Tetap
Definisi Operasional	Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan	Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan	Tetap

Keterangan	Semula	Menjadi	Justifikasi
	peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.	peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.	
Cara Perhitungan	Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja (Bobot 24); (2) Pengukuran Kinerja (Bobot 24); (3) Pelaporan Kinerja (Bobot 12); (4) Evaluasi Kinerja Internal (Bobot 20); (5) Capaian Kinerja (Bobot 20).	Penjumlahan 4 (empat) komponen penilaian AKIP, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja (Bobot 30); (2) Pengukuran Kinerja (Bobot 30); (3) Pelaporan Kinerja (Bobot 15); (4) Evaluasi Kinerja Internal (Bobot 25);	Penyesuaian jumlah komponen menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Keterangan	Semula	Menjadi	Justifikasi																																							
	Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut: <table><tr><td>No</td><td>Komponen</td><td>Bobot</td></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>24</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>24</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Kinerja Internal</td><td>20</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>Nilai Evaluasi</td><td>100</td></tr></table>	No	Komponen	Bobot	1	Perencanaan Kinerja	24	2	Pengukuran Kinerja	24	3	Pelaporan Kinerja	12	4	Evaluasi Kinerja Internal	20	5	Capaian Kinerja	20		Nilai Evaluasi	100	Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut: <table><tr><td>No</td><td>Komponen</td><td>Bobot</td></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Kinerja Internal</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td>Nilai Evaluasi</td><td>100</td></tr></table>	No	Komponen	Bobot	1	Perencanaan Kinerja	30	2	Pengukuran Kinerja	30	3	Pelaporan Kinerja	15	4	Evaluasi Kinerja Internal	25		Nilai Evaluasi	100	
No	Komponen	Bobot																																								
1	Perencanaan Kinerja	24																																								
2	Pengukuran Kinerja	24																																								
3	Pelaporan Kinerja	12																																								
4	Evaluasi Kinerja Internal	20																																								
5	Capaian Kinerja	20																																								
	Nilai Evaluasi	100																																								
No	Komponen	Bobot																																								
1	Perencanaan Kinerja	30																																								
2	Pengukuran Kinerja	30																																								
3	Pelaporan Kinerja	15																																								
4	Evaluasi Kinerja Internal	25																																								
	Nilai Evaluasi	100																																								
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama	Tetap																																							

A.2. MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR INSPEKTORAT UTAMA

ID	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target Semula PK 2026	Target Menjadi PK 2026	Justifikasi
1.1	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18.17	17.07	18.55	17.07	16,93	1. Penyesuaian target mempertimbangkan kebijakan eksternal pada IKU di Eselon II yakni “Nilai SPI BPOM” dan “Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” 2. IKU “Nilai SPI BPOM” memiliki target dengan realisasi kinerja tahun 2025 3. IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” memiliki target berdasarkan rata-rata realisasi kinerja periode tahun 2020-2025
1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	86.39	90.08	87.71	86.39	86.39	Tetap
1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81.58	82.74	83.16	83.16	82.50	1. Terdapat penyesuaian komponen dan bobot pada penilaian SAKIP yang semula 5 komponen menjadi 4 komponen penilaian 2. Penentuan target dilakukan

ID	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target Semula PK 2026	Target Menjadi PK 2026	Justifikasi
							sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.07.2.07.26.541 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026, pada bagian AKIP
1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	*98.75 (Terdapat perbedaan DO)	5	5	5	5	Tetap
1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.34	3.47	3.44	3.52	3.52	Tetap
2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.25	88.71	88.31	88.74	88.74	Tetap
2.2	Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	90.75%	98.56%	92.77%	98.56%	98.56%	Tetap
2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap

ID	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target Semula PK 2026	Target Menjadi PK 2026	Justifikasi
3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.77	2.72 (Dengan Tools Perhitungan berbeda dari D.O)	3.95	2.74	2.74	Tetap
3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	87.3	85.28	82.9	85.28	85.28	Tetap

B. KERTAS KERJA INDIKATOR

1. Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama

- a. Indikator Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama memiliki target pada Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2026, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai berikut:

IKU	Target Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029					Target RKT 2026	Target PK 2026
	2025	2026	2027	2028	2029		
Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,37	18,55	18,73	18,95	19,17	18,55	17,07

- Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Inspektorat Utama adalah gambaran tingkat kemajuan BPOM dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas sesuai lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Utama. Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama merupakan indikator baru di tahun 2025 yang terdiri dari indikator-indikator pendukung pada Reformasi Birokrasi General BPOM dalam lingkup Inspektorat Utama sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024.
- Penilaian yang dikoordinatori oleh Inspektorat Utama pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah:
 - Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas Unit Kerja BPOM
 - Nilai evaluasi SPIP BPOM
 - Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari SAKIP BPOM)
 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOMlima hal di atas menjadi indikator kinerja di level Eselon II (Inspektorat I dan Inspektorat II).

- Penentuan target Renstra yang diikuti dengan PK dan RKT dilakukan berdasarkan target pada indikator-indikator yang berada pada indikator level Eselon II. Penentuan target di Eselon II memiliki pembahasan lebih mendalam pada bagian Eselon II.
- **Penentuan target renstra 2025-2029**

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Skala Nilai	Realisasi 2024	Nilai Konversi (100)	Nilai 2024	Target 2025	Nilai Konversi (100)	Nilai 2025
RB General												
		Hard Element										
		1	Tingkat Maturitas SPIP	4,00	1-5	5	4,09	81,80	3,27	4,20	84,00	3,36
		2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,00	0-100	100	60,00	60,00	1,80	62,86	62,86	1,89
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Bagian evaluasi internal akuntabilitas kinerja bobot 25)	1,00	0-25	25	20,69	82,76	0,83	20,75	83,00	0,83
		Hard Element										
		4	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4,00	0-100	100	96,15	96,15	3,85	96,18	96,18	3,85
		Soft Element										
		5	Survei Penilaian Integritas	10,00	0-100	100	83,98	83,98	8,40	84,48	84,48	8,45
		NILAI RB GENERAL		22,00					18,14			18,37

Penilaian		Bobot	Range Nilai	Skala Nilai	Target 2026	Nilai Konversi (100)	Nilai 2026	Target 2027	Nilai Konversi (100)	Nilai 2027	Target 2028	Nilai Konversi (100)	Nilai 2028	Target 2029	Nilai Konversi (100)	Nilai 2029	Koordinator	
RB General																		
	Hard Element					Hard Element		Hard Element			Hard Element			Hard Element				
	1	Tingkat Maturitas SPIP	4,00	1-5	5	4,25	85,00	3,40	4,30	86,00	3,44	4,40	88,00	3,52	4,50	90,00	3,60	Inspektorat Utama
	2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,00	0-100	100	65,71	65,71	1,97	68,57	68,57	2,06	71,43	71,43	2,14	74,29	74,29	2,23	Inspektorat Utama
	5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Bagian evaluasi internal akuntabilitas kinerja (bobot 25)	1,00	0-25	25	20,81	83,24	0,83	20,88	83,52	0,84	20,94	83,76	0,84	21,00	84,00	0,84	Biro Perencanaan dan Keuangan serta Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada bagian evaluasi internal akuntabilitas kinerja bobot 25)
	Hard Element					Hard Element		Hard Element			Hard Element			Hard Element				
	1	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4,00	0-100	100	96,22	96,22	3,85	96,25	96,25	3,85	96,28	96,28	3,85	96,31	96,31	3,85	Inspektorat Utama
	Soft Element					Soft Element		Soft Element			Soft Element			Soft Element				
	2	Survei Penilaian Integritas	10,00	0-100	100	84,98	84,98	8,50	85,48	85,48	8,55	85,98	85,98	8,60	86,48	86,48	8,65	Inspektorat Utama
	NILAI RB GENERAL		22,00				18,55			18,73			18,95			19,17		

- Penentuan target perjanjian kinerja tahun 2026.**

IKU ini merupakan indikator yang baru muncul di tingkat Eselon I, dikarenakan adanya penyesuaian dari *Balance Scorecard (BSC)* ke *Logical Framework*. Penentuan target kinerja di tahun 2026 telah mempertimbangkan realisasi IKU di tahun 2025. Pada saat periode penyusunan target, realisasi IKU ini masih menggunakan nilai sementara karena adanya realisasi dari IKU “Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas” dan “Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari SAKIP BPOM)” yang belum diketahui realisasinya dari instansi pembina PANRB. Realisasi sementara di tahun 2025 adalah sebesar **17,07** dengan rincian sebagai berikut:

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Skala Nilai	Target 2025	Realisasi 2025	Nilai Konversi (100)	Target Konversi 2025	Real Konversi 2025
RB General											
B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan			5,00						5,25	5,25
	Hard Element										
	1	Tingkat Maturitas SPIP		4	1-5	5	4,20	4.16	83.20	3.36	3.33
	2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas		3	0-100	100	62,86	33.33	33.33	1.89	1.00
	5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Bagian evaluasi internal akuntabilitas kinerja bobot 25)		1	0-25	25	20,75	20.73	82.92	0.83	0.83
	Hard Element										
	1	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK		4	0-100	100	96,18	97.77	97.77	3.85	3.91
	Soft Element										
	2	Survei Penilaian Integritas		10	0-100	100	84,48	80.03	80.03	8.45	8.00
	NILAI RB GENERAL			22,00						18,37	17.07
	KOEFSISIEN										
	TOTAL RB GENERAL									18,37	17.07

Indikator Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama memiliki capaian sebesar **92,92%**. Hal ini dikarenakan terdapat empat IKU yang tidak mencapai target 2025 di tingkat Eselon II yaitu “Tingkat keberhasilan pembangunan ZI”, “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja”, “Survei Penilaian Integritas BPOM” dan “Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM”. “IKU “Tingkat keberhasilan pembangunan ZI” tidak mencapai target karena dari masih terdapat temuan inovasi yang dilakukan unit kerja belum mampu dievaluasi dampaknya, perbaikan pelayanan publik yang belum dapat memberikan dampak positif sesuai harapan. dan “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja” dikarenakan masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh unit kerja BPOM. Selanjutnya, IKU “Survei Penilaian Integritas BPOM” mengalami penurunan yang sangat drastis pada penilaian eksper, namun sampai saat ini Inspektorat Utama masih menunggu laporan resmi dari KPK untuk dapat melihat nilai secara keseluruhan. Untuk IKU “Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM” sudah mengalami kenaikan sebesar **0,07 poin** namun masih belum mencapai target karena masih terdapat beberapa komponen yang perlu dioptimalkan.

Di sisi lain, terdapat kebijakan Peraturan BPKP No 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang berpengaruh

kepada penilaian SPIP karena tercantum terkait pertanyaan Kapabilitas APIP. Selain itu, perlu diketahui bahwa capaian tujuan tahun 2025 terdapat penurunan capaian *output* dan *outcome* akibat adanya efisiensi anggaran dan capaian ini akan dihitung sebagai penilaian SPIP di tahun 2026.

Target pada IKU ini terkait langsung dengan adanya penyesuaian target di IKU Eselon II. Penyesuaian target terjadi pada IKU yang mendukung di Eselon II, sebanyak 3 dari 5 IKU mengalami penyesuaian penurunan target sehingga Inspektorat Utama mengusulkan penurunan target di tahun 2026 sebagai berikut:

Semula			Menjadi			Justifikasi
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,37	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,07	- Usulan target berdasarkan penyesuaian target pada masing-masing IKU di Eselon II - Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM - Nilai Maturitas SPIP BPOM - Nilai SPI BPOM - Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK - Penyesuaian dilakukan mempertimbangkan kebijakan penilaian di masing-masing IKU Eselon II terkait serta realisasi di tahun 2025

Perhitungan penentuan target:

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Skala Nilai	Target 2026	Nilai Konversi (100)	Target 2026
RB General									
B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan			5,00					
	Hard Element						Hard Element		
	1	Tingkat Maturitas SPIP		4	1-5	5	4.14	82.8	3.31
	2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas		3	0-100	100	33.33	33.33	1.00
	5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Bagian evaluasi internal akuntabilitas kinerja bobot 25)		1	0-25	25	20.76	83.04	0.83
	Hard Element						Hard Element		
	1	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK		4	0-100	100	96.97	96.97	3.88
	Soft Element						Soft Element		
	2	Survei Penilaian Integritas		10	0-100	100	80.53	80.53	8.05
NILAI RB GENERAL				22,00					17.07
KOEFSIEN									
TOTAL RB GENERAL									17.07

b. Indikator Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama mengusulkan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai berikut:

- Pada triwulan II 2026, terdapat kebijakan eksternal yang mempengaruhi pengukuran IKU pada Eselon II yakni “Nilai Survei Integritas BPOM” berdasarkan surat KPK no. B/2698/LIT.01/10-15/05/2026 perihal Penetapan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dan Pelaksanaan Tindak Lanjut SPI 2025 pada 2026. Kegiatan SPI selanjutnya akan dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun sebagai instrumen strategis untuk mengukur tingkat integritas dan memetakan risiko korupsi di tingkat nasional maupun K/L/PD/BUMN. Namun, seluruh instansi peserta SPI melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil SPI melalui implementasi rencana aksi perbaikan sebagai bagian dari penguatan integritas dan tata kelola yang berkelanjutan setiap tahun.

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	Dst.
Kegiatan	Survei Penilaian Integritas + Tindak Lanjut Hasil Survei	Tindak Lanjut Hasil Survei	Survei Penilaian Integritas + Tindak Lanjut Hasil Survei	Tindak Lanjut Hasil Survei	Survei Penilaian Integritas + Tindak Lanjut Hasil Survei	Dst.

Sehingga pada tahun 2026, IKU Eselon II “Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM” **tidak dapat diukur dan diperlukan penyesuaian target.**

- Pada tahun 2026, terdapat pemeriksaan audit kinerja yang menghasilkan rekomendasi dengan tindak lanjut yang lebih lama karena *output* penyelesaian rekomendasi berupa perubahan kebijakan dokumen Peraturan BPOM/Keputusan Kepala Badan. Hal ini mempengaruhi indikator kinerja Eselon II “Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM”. Selain itu, terdapat rekomendasi atas Pemeriksaan LK 2025 dengan *timeline* penyelesaian sesuai POA lebih dari tahun 2026. Terdapat perluasan ruang lingkup pelaksanaan Pemeriksaan BPK RI khususnya pada pemeriksaan kinerja BPK dan Peningkatan jumlah rekomendasi BPK pada tahun 2020-2025:
 - a. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan TA 2025 (Deputi I, II, III, IV, Kesektamaan, Pusdatin) sejumlah 50 rekomendasi dan LK TA 2025 sejumlah 28 rekomendasi
 - b. Pemeriksaan Kinerja atas Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2023 sampai dengan Semester I 2024 (Deputi II, Kesektamaan, Pusdatin) sejumlah 23 rekomendasi dan LK 2024 sejumlah 16 rekomendasi
 - c. Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 dan Semester I 2023 (Deputi III, Kesektamaan, Pusdatin) sejumlah 16 rekomendasi dan LK TA 2023 sejumlah 49 rekomendasi
 - d. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Perizinan, Pengujian Obat dan Makanan, serta Pengawasan Obat pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya (Direktorat Registrasi Deputi I, II, III) sejumlah 44 rekomendasi dan LK TA 2022 sejumlah 30 rekomendasi
 - e. LHP Kinerja atas Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 sejumlah 14 rekomendasi dan LK TA 2021 (Deputi I) sejumlah 57 rekomendasi

f. Pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada BPOM (Deputi I) sejumlah 13 rekomendasi dan LK TA 2020 sejumlah 45 rekomendasi

- Kebijakan KPK yang **berpengaruh** terhadap IKU Eselon II “Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM” serta kegiatan audit BPK yang dinamis diimbangi dengan jumlah rekomendasi yang memerlukan sumber daya yang lebih, **berpengaruh** terhadap IKU Eselon II “Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM”, **juga berpengaruh** terhadap IKU Eselon I “Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama”, sehingga dilakukan pula **penyesuaian target**.

Penyesuaian target IKU “Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama” sebagai berikut:

Semula			Menjadi			Justifikasi
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,07	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	16,93	1. Usulan target berdasarkan penyesuaian target pada IKU Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM dan Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM di Eselon II 2. Penyesuaian dilakukan mempertimbangkan kebijakan dari instansi pembina melalui surat KPK no. B/2698/LIT.01/10-15/05/2026 perihal Penetapan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dan Pelaksanaan Tindak Lanjut SPI 2025 pada 2026. Dimana dinyatakan bahwa pada tahun 2026 tidak ada

Semula			Menjadi			Justifikasi
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
						pelaksanaan Survei Penilaian Integritas sehingga indikator Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM tidak dapat diukur pada Tahun 2026 3. Penyesuaian dilakukan mempertimbangkan perluasan ruang lingkup pelaksanaan Pemeriksaan BPK RI khususnya pada pemeriksaan kinerja BPK dan Peningkatan jumlah rekomendasi BPK pada tahun 2020-2025 serta pemeriksaan audit kinerja yang menghasilkan rekomendasi dengan tindak lanjut yang lebih lama karena <i>output</i> penyelesaian rekomendasi. Selain itu, terdapat rekomendasi atas Pemeriksaan LK 2025 dengan <i>timeline</i> penyelesaian sesuai POA lebih dari tahun 2026

Kertas kerja penentuan target:

Penilaian						SEMULA			MENJADI		
						Bobot	Range Nilai	Target 2026	Nilai Konversi (100)	Target SEMULA INSPEKTORAT UTAMA 2026	Target 2026
RB General											
	B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan									
		Hard Element									
		1	Tingkat Maturitas SPIP	4	1-5	4.14	82.8	3.31	4.14	82.8	3.31
		2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0-100	33.33	33.33	1.00	33.33	33.33	1.00
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Bagian evaluasi internal akuntabilitas kinerja bobot 25)	1	0-25	20.76	83.04	0.83	20.76	83.04	0.83
		Hard Element									
		4	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	0-100	96.97	96.97	3.88	94,74	94,74	3,79
		Soft Element									
		5	Survei Penilaian Integritas	10	0-100	80.53	80.53	8.05	80.03	80.03	8.00
		NILAI RB GENERAL			22,00			17.07			16,93

2. Nilai AKIP Inspektorat Utama

- a. Indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama memiliki target pada Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2026, Rencana Kinerja Tahun 2026, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai berikut:

IKU	Target Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029					Target RKT 2026	Target PK 2026
	2025	2026	2027	2028	2029		
Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58	83,16	83,95	84,74	85,52	83,16	83,16

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
- Nilai AKIP Inspektorat Utama merupakan penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja (Bobot 24); (2) Pengukuran Kinerja (Bobot 24); (3) Pelaporan Kinerja (Bobot 12); (4) Evaluasi Kinerja Internal (Bobot 20); dan (5) Capaian Kinerja (Bobot 20) yang didapat dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama.

- Dalam penentuan target, Inspektorat Utama telah dilakukan dengan skema proyeksi peningkatan sebesar 1 poin di tahun 2025 dibanding dengan realisasi kinerja tahun 2024. Selanjutnya di tahun 2026 peningkatan target diproyeksikan sebesar 0,58 (hal ini merupakan rata-rata kenaikan realisasi kinerja tertinggi di Inspektorat Utama), dan di tahun 2027-2029 dilakukan peningkatan proyeksi target sebesar 0,79. Secara lebih detail dapat dilihat sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Nilai AKIP				Rata2 kenaikan satker 2020-2023	Nilai 2024	Rata2 kenaikan satker 2020-2024	Rata2 kenaikan per cluster
		2020	2021	2022	2023				
1	Inspektorat Utama	79,75	82,21	81,96	81,5	0,58	81,58	0,46	0,79

No	Satuan Kerja	TARGET AKIP					Rata- Rata kenaikan target 2025-2029	Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029		
1	Inspektorat Utama	82,58	83,16	83,95	84,74	85,52	0,79	1. Peningkatan target diproyeksikan dengan rata-rata selama tahun 2025-2029 adalah 0,79. 2. Hal ini dilakukan dengan skema proyeksi peningkatan sebesar 1 poin di tahun 2025 dibanding dengan realisasi kinerja tahun 2024. Selanjutnya di tahun 2026 peningkatan target diproyeksikan sebesar 0,58 (hal ini merupakan rata-rata kenaikan realisasi kinerja tertinggi di Inspektorat Utama), dan di tahun 2027-2029 dilakukan peningkatan proyeksi target sebesar 0,79.

- b. Terdapat Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.07.2.07.26.541 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026, pada bagian AKIP, terdapat informasi penyesuaian komponen dan bobot penilaian sebagai berikut:

No	Semula		Menjadi	
	Komponen	Bobot	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	24	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	12	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja	20	Evaluasi Kinerja	25
5	Capaian Kinerja	20		

- c. Penyesuaian komponen dan bobot ini menjadi pertimbangan Inspektorat Utama untuk melakukan **penyesuaian target**. Penyesuaian target dilakukan dengan konversi perhitungan dari realisasi tahun 2025 sebagai berikut:

No	Komponen	Realisasi 2025			
		Semula		Menjadi	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	24	20.16	30	25.20
2	Pengukuran Kinerja	24	18.96	30	23.70
3	Pelaporan Kinerja	12	10.08	15	12.60
4	Evaluasi Kinerja	20	16.80	25	21.00
5	Capaian Kinerja	20	16.74		
	Total		82.74		82.50

- d. Realisasi indikator kinerja “Nilai AKIP Inspektorat Utama” dalam kurun waktu 3 tahun terakhir jika dilakukan konversi dapat dilihat sebagai berikut:

Semula				Menjadi			
Komponen	2023	2024	2025	Komponen	2023	2024	2025
Perencanaan	20.88	20.16	20.16	Perencanaan	26.10	25.20	25.20
Pengukuran	20.88	20.16	18.96	Pengukuran	26.10	25.20	23.70
Pelaporan	10.44	10.08	10.08	Pelaporan	13.05	12.60	12.60
Evaluasi Internal	16.80	16.80	16.80	Evaluasi Internal	21.00	21.00	21.00
Capaian kinerja	12.50	14.38	16.74				
Nilai AKIP	81.50	81.58	82.74	Nilai AKIP	86.25	84.00	82.50

Berdasarkan data konversi realisasi kinerja di atas, realisasi indikator kinerja “Nilai AKIP Inspektorat Utama” selama 3 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target indikator “Nilai AKIP Inspektorat Utama

e. Penyesuaian target pada IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

Semula			Menjadi			Justifikasi
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai AKIP Inspektorat Utama	83,16	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,50	- Usulan target menggunakan konversi perhitungan terbaru dari realisasi tahun 2025 - Penyesuaian dilakukan mempertimbangkan kebijakan dari unit pembina sebagaimana disampaikan dalam lampiran Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.07.2.07.26.541 hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026, terdapat penyesuaian komponen perhitungan dari yang semula 5 (lima) komponen menjadi 4 (empat) komponen.

Jakarta, 06 Agustus 2026

Inspektur Utama BPOM RI



YAN SETIADI